

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

HI adalah nama singkatan bagi subjek akademis hubungan internasional. Hubungan Internasional dapat di definisikan sebagai studi hubungan interaksi antara negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multinasional. Hubungan internasional dapat berupa subjek teoritis dan subjek praktis atau subjek kebijakan, dan pendekatan akademis terhadapnya dapat bersifat empiris atau normatif. HI sering dianggap sebagai cabang ilmu politik, tetapi juga merupakan subjek yang dipelajari pake sejarah (sejarah internasional atau sejarah diplomatik), dan pakar ekonomi (ekonomi internasional). HI juga merupakan bidang studi legal (hukum internasional publik) dan bidang filsafat (etika internasional). Dari persepektif yang lebih luas tersebut, HI jelas merupakan *inquiry* (riset empiris) interdisipliner. Aspek hubungan internasional, terutama perang dan diplomasi, telah diteliti dengan cermat dan dipuji paling tidak semenjak Yunani kuno. (Jackson & Sorensen, 2014:4).

Hubungan Internasional adalah bentuk interaksi dimana negara menjadi aktor dalam melakukan interaksi dengan negara-negara lain. Dalam praktiknya dalam Hubungan Internasional tidak hanya negara yang

memainkan peran dalam berinteraksi melewati batas-batas negara namun masyarakat atau kelompok masyarakat baik yang berada dibawah pemerintah atau diluar pemerintah mempunyai peranan juga dalam berinteraksi di dunia internasional. Hubungan Internasional terjadi karena adanya keharusan sebagai akibat dari adanya rasa ketergantungan antar negara dan sangat kecil kemungkinan jika suatu negara tidak melakukan interaksi dengan negara lain khususnya di zaman sekarang ini.

Masoed, 2011 dalam (Sitepu, 2011:7). Interaksi dalam hubungan internasional bermula dari interaksi antar negara yang meliputi permasalahan politik, namun hal ini terus berkembang dan mencakup banyak aspek dalam praktiknya seperti meliputi ekonomi, budaya, keamanan, sosial dan lain sebagainya. Pada prinsipnya hubungan internasional ada untuk mempelajari perilaku negara sebagai aktor ataupun untuk mempelajari perilaku yang tidak digolongkan kedalam kategori negara seperti halnya organisasi internasional, dalam hal ini perilaku yang dimaksud adalah seperti perang, kerjasama, konflik, dan kerjasama yang dilakukan organisasi internasional.

Dalam perjalanan dan perkembangan studi Ilmu Hubungan Internasional, perkembangan tentang apa yang menjadi pembahasan dan pokok-pokok dasar studi dalam Hubungan Internasional yang dapat dikatakan sebagai disiplin ilmu baru dalam melihat dunia yang lebih luas yang dimana pada awalnya hanya politik antar negara yang menjadi fokus utama terus berkembang, dimana tujuh tahun kemudian setelah munculnya pernyataan tentang apa saja yang menjadi dasar dan pokok dalam Hubungan Internasional

terus digali dan dipelajari dimana hal ini menghasilkan tujuh poin yang dapat menggambarkan tentang permasalahan yang dibahas dalam studi Ilmu Hubungan Internasional adalah:

1. Sifat dan kekuatan-kekuatan pokok (*principal force*) dari politik internasional.
2. Organisasi politik, sosial dan ekonomi dalam kehidupan internasional.
3. Unsur-unsur dari kekuatan nasional (*national power*).
4. Instrumen-instrumen yang tersedia untuk mencapai kepentingan nasional.
5. Pembatasan dan kontrol atas kekuatan nasional.
6. Politik luar negeri dari suatu atau beberapa negara besar.
7. Unsur sejarah sebagai latar belakang dari faktor-faktor lainnya dan juga sebagai sejarah dari kejadian-kejadian internasional yang baru lampau (Darmayadi, dkk. 2015:33).

Selain itu, ada empat tradisi teoritis penting dalam Hubungan Internasional : realisme, liberalisme, masyarakat internasional, dan Ekonomi Politik Internasional. Selain itu, ada sekelompok pendekatan alternatif yang lebih beragam yang telah mengemuka. Pendekatan alternatif yang paling penting diantara pendekatan tersebut adalah konstruktivisme sosial. Ada banyak teori yang berbeda-beda dalam HI. Teori-teori itu dapat diklasifikasikan dengan sejumlah cara, ada yang disebut 'tradisi teoritis utama' bukanlah suatu entitas objektif. Ada tiga perdebatan besar sejak HI menjadi subjek akademik di akhir perang dunia pertama dan masuk pada awal tahap

keempat perdebatan besar. Perdebatan besar pertama adalah antara liberalisme utopia dan realisme; yang kedua antara pendekatan tradisional dan behavioralisme; yang ketiga antara neoralisme/neorealisme dan neo-marxisme. Perdebatan keempat yang muncul adalah antara tradisi yang telah mapan dan alternatif-alternatif kaum pasca-positivisme (Jackson & Sorensen, 2014:55).

2.1.2 Ekonomi Politik Internasional

Dekade setelah perang dunia kedua adalah periode dekolonisasi. Sejumlah besar negara 'baru' muncul pada peta sewaktu kekuatan koloni lama menyerahkan kendalinya dan bekas koloni-koloninya diberi kemerdekaan politik. Banyak negara'baru' lemah dalam bidang ekonomi, mereka berada di dasar hierarki ekonomi global dan merupakan negara 'Dunia ketiga (negara berkembang)'. Hal ini menjadi dasar bagi perdebatan besar ketiga dalam HI mengenai kesejahteraan internasional dan kemiskinan internasional, yaitu tentang ekonomi politik internasional atau disingkat EPI.

Neo-Marxisme adalah upaya untuk menganalisis situasi Dunia ketiga dengan memakai alat-alat analisis yang pertama kali dikembangkan oleh Karl Marx. Marx, seorang ahli ekonomi politik abad ke-19, memfokuskan pada kapitalisme di Eropa, ia berpendapat bahwa kelas borjuis atau kapitalis menggunakan kekuatan ekonominya untuk mengeksploitasi dan menekan proletar, atau kelas pekerja. Neo-marxis memperluas analisis tersebut ke Dunia ketiga dengan berpendapat bahwa perekonomian kapitalis global yang dikendalikan oleh negara kapitalis kaya dipergunakan untuk memiskinkan negara-negara miskin dunia. 'ketergantungan' merupakan konsep inti bagi

kaum neo-marxisme. Mereka menyatakan bahwa negara-negara di dunia ketiga itu miskin karena mereka memang terbelakang atau tidak maju. Melainkan, mereka miskin karena ditelantarkan oleh negara-negara kaya Dunia Pertama. Negara-negara Dunia Ketiga merupakan subjek pertukaran tidak seimbang, agar dapat ikut serta dalam perekonomian kapitalis global. Mereka harus menjual bahan mentah pada tingkat harga yang murah dan mereka harus membeli barang-barang jadi dengan harga yang mahal (Jackson & Sorensen, 2014:92).

Berbeda dengan pandangan EPI Liberal, para pakar EPI liberal berpendapat bahwa kesejahteraan manusia dapat dicapai dengan perluasan kapitalisme global yang bebas diluar batas negara berdaulat, dan oleh penurunan signifikansi batas-batas tersebut. Kaum liberal menjelaskan dari analisis ekonomi Adam Smith dan para ekonom liberal klasik lainnya, yang berpenapat bahwa pasar bebas bersama dengan kepemilikan swasta dan kebebasan individu menciptakan dasar bagi kemajuan ekonomi yang menguntungkan bagi siapapun yang terlibat. Masyarakat tidak akan melakukan pertukaran dipasar bebas kecuali akan mendapatkan keuntungan darinya. Dengan demikian, mengingat kaum EPI Marxis memandang kapitalisme internasional sebagai suatu instrumen bagi eksploitasi negara-negara berkembang oleh negara-negara maju, EPI liberal memandangnya sebagai instrumen perubahan progresif bagi semua negara tanpa memandang tingkat perkembangannya.

Menurut Gilpin (1987). Kaum EPI realis juga berbeda. Hal itu dapat dilacak kembali pada pemikiran Friedrich List, seorang ekonom Jerman abad ke-19. Pemikirannya didasarkan pada ide bahwa aktivitas ekonomi seharusnya diletakan pada pelayanan pembentukan suatu negara yang kuat dan mendukung kepentingan nasional. Dengan demikian, kekayaan seharusnya dikendalikan dan diatur oleh negara. Doktrin EPI statis tersebut dianggap sering dianggap sebagai ‘Merkantilisme’ atau ‘Nasionalisme ekonomi’. Bagi kaum merkantilis, penciptaan kekayaan merupakan dasar yang dibutuhkan dalam meningkatkan kekuatan negara. Kekayaan adalah suatu instrumen dalam penciptaan keamanan nasional dan kesejahteraan nasional. Selain itu, lancarnya fungsi pasar bebas tergantung pada kekuatan politik. Tanpa kekuatan atau hegemoni yang dominan, tidak akan ada perekonomian dunia yang liberal (Jackson & Sorensen, 2014:281).

Pandangan EPI yang berbeda ini muncul dalam analisis terhadap tiga isu EPI yang penting dan berkaitan. Isu *pertama* menyangkut globalisasi ekonomi; yaitu, penyebaran dan intensifikasi semua jenis hubungan ekonomi di antara negara-negara. Isu *kedua*, adalah tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam proses globalisasi ekonomi. Isu ketiga, menyangkut bagaimana kita seharusnya memandang relatif pentingnya politik dan ekonomi.

2.1.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional muncul karena adanya kebutuhan negara yang tidak dapat negara penuhi secara mandiri. Dalam hal ini negara sebagai aktor dalam mengambil keputusan dan memerankan peranan negara dalam berorientasi dengan dunia internasional yang akan berpengaruh kepada masyarakat dalam negeri negara tersebut. Negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas, karena itu negara dipandang sebagai sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara menjamin kondisi keamanan dan upaya memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat akan menjadi terbatas (Jackson & Sorensen, 2014:286).

Kepentingan nasional dapat dilihat dari kondisi internal negara yang meliputi kondisi politik-ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan. Kepentingan nasional juga dapat didasari oleh *power* yang ingin diciptakan negara, sehingga dalam hal ini negara dapat memberikan dampak langsung kepada negara lain dalam melakukan pertimbangan dan pengakuan. Peran negara dalam memenuhi dan memberi sebagai dasar dari kepentingan nasional dan orientasi negara dalam menjalin hubungan antar negara di dunia internasional secara konseptual dapat dipergunakan untuk menggambarkan perilaku politik luar negeri dari satu negara (Sitepu, 2011:163).

Latar belakang keberagaman dari masing-masing negara yang ada diseluruh dunia dan kemampuan serta kapasitas negara yang berbeda-beda, serta adanya pengaruh yang dapat tercipta dan dipengaruhi oleh faktor demografi, budaya, sejarah dan karakter yang dimiliki oleh negara tersebut

sehingga negara dalam melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dan keunggulan-keunggulan yang dapat menjadi sebuah pertimbangan. Kecenderungan negara dalam melaksanakan kepentingan nasional dapat menjadi gambaran tentang adanya aspek-aspek yang menjadi dasar dan identitas negara tersebut. Hal ini dilihat dari sejauh mana fokus negara dalam rangka memenuhi yang menjadi target pencapaian demi keberlangsungan warga negaranya. Melalui identitas yang diciptakan negara dapat dirumuskan apa yang menjadi tujuan pencapaian negara dalam waktu dekat, bersifat sementara ataupun yang menjadi tujuan dalam waktu yang panjang. Hal ini dipengaruhi dengan seberapa penting identitas yang menjadi tujuan pencapaian negara apakah penting atau tidak terlalu penting.

Kepentingan nasional digunakan sebagai arah dalam penentuan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional juga digunakan untuk menjelaskan dan memberikan *support* dalam kebijakan tertentu. Dalam mengejar kepentingan nasional, perlu dilihat dan menjadi pertimbangan bahwa keamanan teritorial, vitalitas ekonomi, dan kemerdekaan politik dalam negeri (*domestik*) dan luar negeri saling terhubung dan batas-batas keduanya dapat menjadi kabur. Kepentingan nasional suatu negara tidak hanya menjadi satu keperluan, namun terdiri dari beberapa kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh negara yang bersangkutan. Tidak ada negara yang bisa menyelesaikan seluruh yang diinginkan dalam kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu setiap negara harus memiliki sistem operatif tentang prioritas yang mengatur pilihan-pilihan kebijakannya, dimana didalamnya tercakup skala prioritas dari kebijakan luar

negeri suatu negara. Tanpa adanya skala prioritas yang jelas dan rinci dalam kebijakan luar negeri suatu negara akan lebih sulit bagi negara tersebut untuk mengoperasionalkan kebijakan luar negerinya, sebaliknya, negara yang merancang skala prioritas yang baik dalam kebijakan luar negerinya akan lebih mudah dalam melaksanakannya serta mencapai sasaran yang diharapkan dari kebijakan luar negeri tersebut.

Kepentingan nasional merupakan suatu hal yang bersifat kontekstual dan dapat dievaluasi hanya dalam bentuk dari sebuah elemen *power* seperti kapabilitas militer, sumber daya ekonomi, dan jumlah penduduk. *Power* secara historis berkaitan dengan *forces*. Meskipun demikian, salah satu bagian dari *power* tidak dapat menentukan *national power*. Kepentingan nasional juga dibagi berdasarkan tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

1. *Primary interest*, kepentingan utama yang tidak dapat dikompromikan atau ditukar, semua negara di dunia memiliki kepentingan ini dan mutlak harus mempertahankannya, yang meliputi perlindungan terhadap fisik negara, politik, dan identitas budaya dan keselamatan negara dari ancaman luar.
2. *Secondary interest*, kepentingan yang diarahkan keluar dari negara tersebut, yang diantaranya: melindungi aset- aset negara di luar negeri, melindungi warga negara lain, dan memberi kekebalan bagi warga negara lain yang menjabat sebagai seorang diplomat merupakan kepentingan sekunder.

3. *Permanent interest*, kepentingan yang cenderung konstan dalam jangka panjang, kepentingan ini bervariasi seiring dengan berjalannya waktu, namun cenderung dapat berubah secara lambat,
4. *Variable interest*, kepentingan ini merupakan fungsi berdasarkan personalitas, opini publik, kepentingan-kepentingan yang bersifat parsial, partisan politik dan moral yang berlaku pada saat ini. Dengan kata lain variabel-variabel inilah yang lebih sering disebut sebagai kepentingan nasional di zaman ini karena dapat berubah-ubah dalam kurun waktu yang sangat cepat.
5. *General Interest*, kepentingan dimana negara dapat menerapkannya dalam bentuk yang tepat dan umum di sebuah daerah geografis yang luas pada sejumlah besar negara, atau pada beberapa lapangan yang bersifat khusus seperti ekonomi, perdagangan, diplomatik, hukum internasional, dan sebagainya.
6. *Specific interest*, kepentingan yang pendekatannya cenderung lebih menitik beratkan kepada waktu dan tempat dalam melaksanakan kepentingan nasional (Rosenau, 2006:247-249).

2.1.4 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang tidak dibatasi oleh letak negara atau memiliki lingkup seluruh dunia, kerjasama internasional biasanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan seluruh negara-negara di dunia. Meningkatnya hubungan antar satu negara dengan negara lainnya pada saat ini semakin

memperlihatkan bahwa semua negara yang ada di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri dengan memenuhi kebutuhan terlebih dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan negaranya. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Perkembangan situasi hubungan internasional ditandai dengan berbagai kerjasama internasional dan berkembangnya berbagai aspek diantaranya rasionalisme ekonomi di berbagai kawasan telah membawa pengaruh semakin besarnya persoalan sosial ekonomi yang lebih menyita perhatian negara-negara di dunia melalui serangkaian kerjasama internasional. Demikian halnya, negara di dunia semakin memperkuat posisi saling ketergantungan secara global yang tampak semakin nyata dan titik beratnya adalah pada upaya meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa yang dilandasi prinsip saling percaya, menghargai dan menghormati. Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu negara atau lebih (Perwita & Yani, 2014:33).

Hubungan kerjasama internasional dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional, di samping demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan harapan seluruh manusia dan negara di dunia. Setiap negara sudah pasti memiliki kelebihan, kekurangan dan kepentingannya masing-masing. Hal-hal inilah yang mendorong laksananya kerjasama internasional. Perkembangan pesat dalam hubungan luar negeri yang paling berkembang terkait kerjasama *win-win solution* perjanjian. Setiap perjanjian

internasional yang dilaksanakan akan mengikat suatu negara yang menyatakan terikat ke dalamnya melalui suatu peraturan yang dibuat oleh negara. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat (Perwita & Yani, 2014:34).

Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Menurut Muhadi Sugiono ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional:

1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara- negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Perwita & Yani, 2014:39).

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi

langsung diantara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama secara bersamaan. Bentuk kerjasama lainnya dilakukan antara negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional. Kerjasama yang terbentuk pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya interdependensi, dimana organisasi internasional sebagai wadah kerjasama memainkan peran penting dengan kapasitasnya sebagai aktor non-negara. Tujuan akhir dari kerjasama yang terjalin ditentukan oleh persamaan kepentingan yang hakiki dari masing-masing pihak yang terlibat (Perwita & Yani, 2014:35).

2.1.5 Diplomasi Ekonomi

Dalam buku “Mengenai Studi Hubungan Internasional”, Andrias Darmayadi (2015), mengemukakan pendapat bahwa :

“Diplomasi merupakan harapan yang besar bagi hubungan internasional pada konteks sekarang ini untuk melestarikan dan melindungi peradaban umat manusia. Dengan demikian, maka diperlukan adanya upaya untuk membuat diplomasi itu menjadi aktif dan lebih berorientasi pada per-damaian” (Darmayadi, dkk, 2015 : 58).

Diplomasi sendiri sebagai cara bagi negara untuk memenuhi kepentingan nasional nya. Dalam ekonomi politik internasional, interaksi antar aktor atau pelaku ekonomi dicapai melalui komunikasi, salah satunya dengan diplomasi. Diplomasi sendiri merupakan suatu aktivitas yang pada awalnya dilakukan oleh pihak tertentu (secara resmi oleh pejabat pemerintah; diplomat) yang mewakili negaranya di negara lain dengan tujuan mencapai kepentingan nasional. Salah satu tugas utama diplomasi adalah mendorong hubungan ekonomi negara yang diwakili terhadap negara tujuan khususnya dalam hal

menjaga hubungan pasar, proteksi, dan pengawasan. Aktivitas inilah yang kemudian disebut sebagai diplomasi ekonomi.

Menurut seorang diplomat ekonomi dan komersial dari Slovakia Pavol Baranay, diplomasi ekonomi merupakan aktivitas resmi diplomatik yang fokus pada tujuan kepentingan ekonomi suatu negara dalam level internasional. Hal ini mencakup upaya peningkatan ekspor, menarik investasi asing, dan partisipasi kerja dalam berbagai organisasi ekonomi internasional (Baranay, 2009:2).

Definisi lain disampaikan oleh Rana, S. K (2007:201) yang menyatakan bahwa diplomasi ekonomi merupakan suatu proses dimana negara berhubungan dengan dunia luar dalam upaya memaksimalkan tujuannya di segala bentuk aktivitas, seperti perdagangan, investasi, dan bentuk lainnya dari interaksi ekonomi. Dimensi diplomasi ekonomi sendiri dapat berupa bilateral, regional, maupun multilateral yang terdiri dari agen resmim yaitu kementerian luar negeri dan perdagangan, layanan diplomatik dan komersial, serta aktor non-negara lainnya sehingga membuat partnership ekonomi bersifat dinamis.

Ilmu diplomasi ekonomi secara ilmiah mempelajari tentang hubungan diplomasi dan perdagangan yang kompleks, kerjasama, dan cara mempengaruhi kebijakan ekonomi eksternal. Sama seperti diplomasi pada umumnya, diplomasi ekonomi merupakan komponen dari kebijakan luar negeri yaitu aktivitas internasional suatu negara. Kebijakan luar negeri menentukan tujuan dan sasaran dari diplomasi ekonomi yang pada akhirnya harus kembali mencerminkan seluruh aktivitas, bentuk, tujuan, dan metode

yang digunakan untuk merealisasi kebijakan luar negeri tersebut. Baranay menyatakan bahwa diplomasi ekonomi merupakan faktor kunci utama perekonomian dalam upaya mencapai tujuan-tujuan kebijakan luar negeri (Baranay, 2009:3).

Perkembangan peran dan fungsi diplomasi ekonomi pada sistem ekonomi internasional modern didorong oleh berbagai faktor, diantaranya adalah sebagai berikut; [1] proses internasionalisasi dan penguatan dependensi sistem ekonomi dunia mengarahkan pada dua hal, yaitu integrasi global dan regional. [2] Ekspansi pesat yang terjadi pada ekonomi pasar, liberalisasi perekonomian nasional, dan peningkatan interaksi negara melalui perdagangan dan investasi internasional, serta peningkatan aktor ekonomi global seperti perusahaan multinasional, bank, dan kelompok investasi. [3] Globalisasi ekonomi; gabungan antara proses internasionalisasi dan peningkatan peran perusahaan multinasional berdampak pada peningkatan peran diplomasi ekonomi. Dalam hal ini, diplomasi ekonomi berperan dalam mendorong perkembangan internasionalisasi di negara, namun disisi lain juga menahan kekuatan dari negara atau aktor lain yang berusaha memonopoli keuntungan dari globalisasi tersebut. [4] Bentuk adaptasi terhadap metode manajemen progresif, efisiensi energi, dan teknologi baru sehingga investasi asing dapat memastikan perkembangan kerjasama antarnegara dan organisasi internasional. [5] Perkembangan inovasi ekonomi negara terhadap keterbukaan ekonomi eksternal. Hal ini berdampak pada pembangunan imej positif negara

yang akan menarik wisata asing dan daya tarik investasi asing sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Baranay, 2009:4-5).

Menurut Baranay, (2009:6) selanjutnya, menarik investasi asing merupakan isu esensial dalam diplomasi ekonomi. Untuk menciptakan kesempatan tersebut, diplomasi ekonomi dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara eksportir dan partner dagangnya, untuk menjelaskan dan menyusun prioritas serta memperlihatkan aspek-aspek mana yang menguntungkan apabila kegiatan ekspor-impor dilakukan. Selanjutnya, fungsi lain adalah untuk memfasilitasi dan mendukung aktivitas perdagangan internasional, melobi kepentingan perusahaan domestik di luar negeri, bantuan politik dan perdagangan, mobilisasi sumber daya eksternal yang efektif untuk tujuan pembangunan, serta yang paling utama adalah untuk mempertahankan kondisi yang menguntungkan dari kerjasama ekonomi internasional yang mampu mendorong dan meningkatkan level dan kualitas kehidupan masyarakat.

Menurut Rana, S. Kishan (2007), menjelaskan beberapa faktor penting yang membuat diplomasi ekonomi berjalan sukses, yaitu sebagai berikut; [1] Hubungan ekonomi luar negeri melibatkan tidak hanya kementerian luar negeri, perdagangan, dan industri negara yang bersangkutan, namun juga melibatkan segala unit bisnis di negara tersebut, seperti asosiasi perdagangan dan industri, sektor finansial, sekolah dan lembaga penelitian bisnis, industri pariwisata, dan aktor domestik yang merupakan stakeholder sekaligus prime mover. [2] Struktur kementerian luar negeri dan badan pengaturan ekonomi

eksternal harus terintegrasi dan selaras. [3] Membuat prioritas kembar diplomasi ekonomi yaitu antara promosi ekspor dan mobilisasi ke dalam investasi asing. Promosi ekspor mencakup bantuan terhadap perusahaan domestik yang mencari pasar di luar negeri; studi pasar, kunjungan delegasi bisnis, partisipasi dalam pertemuan perdagangan internasional, serta pertemuan pembeli-penjual. [4] Kerangka peraturan dagang yang secara sah ditentukan oleh pemerintah merupakan pemikiran bersama dengan pelaku bisnis serta think-tanks dan scholars yang bertujuan untuk membentuk kondisi yang meningkatkan perdagangan dan investasi negara. [5] Harus membedakan antara diplomasi ekonomi yang beroperasi di ibukota negara dan di lapangan melalui jaringan yang ada di kedutaan dan konsuler. [6] Adanya perbedaan efektivitas diplomasi ekonomi di tiap-tiap negara. Misi diplomatik yang dijalankan oleh orang-orang terlatih dan staf profesional memberikan keuntungan power dan pengaruh negara yang diwakilinya (Rana, 2007:204-207).

2.1.6 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri pada dasarnya merupakan kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap dan arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional, Perwita & Yani (2014:47). Politik luar negeri merupakan sistem tindakan-tindakan dari suatu pemerintah terhadap pemerintahan

lainnya. Politik luar negeri adalah sekumpulan kebijakan yang berperan dan berpengaruh, dalam hubungan suatu negara (pemerintah) dengan negara (pemerintahan) lainnya, dengan mempertimbangkan juga tanggapan (respon terhadap kejadian dan masalah dilingkungan dunia internasional). Dengan kata lain politik luar negeri merupakan sintesa dari pengejawantahan tujuan dan kemampuan (kapabilitas) nasional.

Politik luar negeri merupakan suatu strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dicapai melalui politik luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta *power* yang dimiliki untuk menjangkaunya. Tujuan dirancang, dipilih dan ditetapkan oleh pembuat keputusan dan dikendalikan untuk mengubah (*revisionist policy*) atau mempertahankan (*status quo policy*) ihwal kenegaraan tertentu dilingkungan internasional. Politik luar negeri suatu negara senantiasa didalamnya mengandung dua unsur saling berintaraeaksi, yaitu keajegan (tetap) dan perubahan. Unsur keajegan biasanya meliputi nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat di negara tersebut serta prinsip-prinsip dasar bernegara yang disepakati, sementara unsur perubahan lebih menyangkut pada persoalan strategi, prioritas, dan cara-cara memperjuangkan kepentingan nasionalnya (Wuryandari, 2009:17).

Sebagaimana halnya kepentingan nasional yang dapat mengalami perubahan, demikian pula politik luar negeri suatu negara. Namun, ada beberapa faktor determinan ada indikator yang dapat digunakan untuk memahami perilaku politik luar negeri. Dalam hal ini, William D. Coplin mengidentifikasi ada empat determinan politik luar negeri. *Pertama*, adalah konteks internasional. Artinya, situasi politik internasional yang sedang terjadi pada waktu tertentu dapat mempengaruhi bagaimana negara itu akan berperilaku. *Kedua*, adalah perilaku para pengambil keputusan. Perilaku pemerintah yang dipengaruhi persepsi, pengalaman, pengetahuan dan kepentingan individu-individu dalam pemerintahannya menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan luar negeri. *Ketiga*, adalah kondisi ekonomi dan militer. Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara dapat mempengaruhi negara tersebut dalam interaksinya dengan negara lain. Dan *Keempat*, yang mempengaruhi politik luar negeri adalah politik dalam negeri. Situasi politik dalam negeri akan memberikan pengaruh dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri (Wuryandari, 2009:18).

2.1.7 Politik Internasional

Politik internasional merupakan salah satu kajian pokok (*core subject*) dalam hubungan internasional. Politik internasional mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan (*interests*) dan kekuasaan (*power*). Menurut Holsti dalam Perwita dan Yani, studi politik internasional adalah studi mengenai pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain. Politik internasional merupakan salah

satu wujud dari interaksi dalam hubungan internasional. Politik internasional membahas keadaan atau soal-soal politik masyarakat internasional dalam arti sempit, yaitu berfokus pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya. Dalam politik internasional pelakunya hanyalah negara, inilah yang membedakan antara politik internasional dengan hubungan internasional (Perwita & Yani, 20014:40).

Politik internasional menggambarkan hubungan dua arah, menggambarkan reaksi dan respon bukan aksi. Adapun objek yang menjadi kajian politik internasional merupakan kajian politik luar negeri, dimana keduanya menitik beratkan pada penjelasan mengenai kepentingan, tindakan serta unsur *power*. Dalam interaksi antar negara terdapat hubungan pengaruh dan respons. Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran tetapi dapat juga merupakan limpahan dari suatu tindakan tertentu. Negara yang menjadi sasaran dari pengaruh negara lain secara langsung maupun tidak langsung, harus menentukan sikap melalui respons, manifestasi dalam hubungan dengan negara lain untuk mempengaruhi atau memaksa negara lainnya agar menerima keinginan politiknya (Perwita & Yani, 2014:41).

Dengan adanya perebutan kekuasaan, maka para aktor yang terlibat dalam upaya-upaya untuk mendapatkan kekuasaan tersebut merupakan aktor dalam kancah politik internasional. Dalam dunia politik internasional tidak semua tindakan yang diambil oleh aktor-aktor selalu bersinambungan dan berhubungan dengan politik. Keterlibatan aktor-aktor dalam politik internasional hanya satu dalam sekian banyak jenis kegiatan dimana aktor-

aktor tersebut dapat ikut serta dalam kancah internasional. Tidak semua negara terlibat dalam taraf yang sama, sehingga hubungan negara dengan politik internasional bersifat dinamis.

Terdapat suatu penggambaran tiga arena dalam politik internasional, yaitu *global*, *region*, dan *nation-state* yang memberikan dasar struktur analitis untuk pertimbangan politik internasional. Didalam politik internasional, sebuah sistem merupakan keseluruhan hubungan yang berlangsung diantara unit-unit yang mempunyai kuasa didalam arena khusus, ada tiga arena yang mewakili tiga sistem tersebut, yaitu :

1. Sistem dominan (*the dominant system*) yang berada di arena global, merupakan konfrontasi yang paling kuat dari negara-negara.
2. Sistem subordinat (*the subordinate system*) yang berada di suatu region, merupakan keseluruhan interaksi hubungan-hubungan diantara region tersebut.
3. Sistem internal (*the internal system*) yang berada disuatau negara (bangsa), merupakan keseluruhan hubungan-hubungan organisasi yang tersusun didalam suatu politik domestik (Perwita & Yani, 2014:44).

2.2 Kerangka Pemikiran

China telah menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar di dunia, dimana kekuatan perekonomian China ini telah menyaingi kekuatan dunia saat ini seperti Jepang dan Amerika Serikat. Pertumbuhan China yang begitu pesat dalam ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan dalam bidang Industri dan Teknologi yang telah dihasilkan. China memiliki populasi

penduduk 1,3 miliar, hanya dalam kurun waktu beberapa tahun sejak China melakukan reformasi ekonomi. China berhasil membuka mata dunia untuk menjadi salah satu negara yang patut diperhitungkan dalam dalam perekonomian global.

Keterbukaan ekonomi China dengan sistem ekonomi terbuka atau liberal yang dipelopori oleh Deng Xiaoping ternyata mampu meningkatkan perekonomian China secara pesat. Kemajuan China secara pesat ini memicu meningkatnya kebutuhan energi terutama untuk Industri-industri di China. Dengan tingkat populasi penduduk yang tinggi, ketersediaan lahan yang terbatas dan kepentingan nasional untuk mensejahterakan masyarakatnya, membuat China perlu melakukan ekspansi ke negara lain untuk merealisasikan kepentingan nasional nya. Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional negara nya China melakukan ekspansi ke negara-negara atau kawasan lain seperti Afrika, salah satu negara nya ialah Zimbabwe.

Selain dasar agar pemenuhan ekonomi, energi dan sosial. Kepentingan nasional juga dapat didasari oleh *power* yang ingin diciptakan negara, sehingga dalam hal ini China dapat memberikan dampak langsung kepada negara lain seperti Zimbabwe dalam melakukan pertimbangan dan pengakuan.

Zimbabwe mengalami tantangan sosio-ekonomi dan politik terburuk dalam sejarah pasca-kemerdekaan Zimbabwe. Pada periode 2000-2008 kejatuhan ekonomi Zimbabwe ditengah-tengah politik Internal dan eksternal negara yang semakin tidak stabil, sebagai akibat dari lingkungan ekonomi yang memburuk dan catatan hak asasi manusia yang juga semakin memprihatinkan. Para donor bantuan

dari negara-negara yang sebelumnya membantu Zimbabwe dan mitra dagang dari Barat mulai melepaskan diri, menarik dukungan komersil dan politik mereka.

Zimbabwe yang terletak antara sungai Limpopo dan sungai Zambesi di bagian selatan Afrika harus hancur dan mengalami perlambatan ekonomi akibat kekurangan pasokan, naiknya inflasi, dan kekurangan Devisa, sehingga mengakibatkan hiperinflasi pada tahun 2008. Zimbabwe sendiri merupakan negara yang mendapatkan sanksi negara-negara Barat, karena pemerintahan *Zimbabwe African National Union-Patriotic Front* (ZANU-PF) pimpinan Presiden Robert Mugabe dinilai telah melakukan pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia.

Kepentingan nasional muncul karena adanya kebutuhan negara yang tidak dapat negara penuhi secara mandiri, China terpaksa melakukan ekspansi ke negara lain untuk dapat memenuhi segala kebutuhan kepentingan nasionalnya. Zimbabwe pun demikian, untuk dapat keluar dari segala permasalahan yang terjadi di negaranya dan untuk pemenuhan kepentingan nasional negaranya, Zimbabwe memerlukan bantuan dan kerjasama negara lain.

Negara barat yang sebelumnya menjadi negara kaya, baik dari segi ekonomi, politik dan militer kini telah memiliki pesaing baru yaitu China. Ditengah sanksi yang tengah di terima Zimbabwe dari negara-negara Barat, China tampil untuk menawarkan kerjasama dan cenderung mengabaikan seruan dari Barat, sehingga memberikan harapan untuk kedua negara memenuhi kepentingan nasionalnya tentunya dengan kesepakatan kerjasama yang disepakati.

Pada perspektif pandangan EPI, ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan. Pengaruh politik dan ekonomi yang besar suatu negara, tentu akan dengan mudah

meyakinkan negara lain untuk dapat melakukan kerjasama. Melihat Zimbabwe bukan menjadi suatu negara yang dapat memberikan suatu kebutuhan maksimal akan sumber daya energi bagi China, namun Zimbabwe ialah salah satu negara di bagian benua Afrika, yang dimana untuk saat ini benua Afrika hanya dapat dilihat sebagai suatu kesatuan benua. Melihat posisi negara-negara di benua Afrika hanya akan memberikan pengaruh jikalau dilihat sebagai suatu kesatuan pemenuhan kepentingan secara keseluruhan benua Afrika.

Dalam perjalanan dan perkembangannya, negara-negara melihat dampak buruk dan berbahaya nya pemenuhan kepentingan nasional dan pengaruh negara harus dilakukan dengan perang. Karena menimbulkan banyak sekali kerugian. Menurut Baranay dan beberapa analisis menekankan bahwa bantuan ekonomi eksternal atau diplomasi kerjasama melalui ekonomi merupakan alat yang mampu membuat negara penyumbang memiliki dampak langsung terhadap negara penerima. Selain itu, bantuan ekonomi juga memiliki konsekuensi politik dimana hal ini terlihat pada salah satu terdahulu dollar AS yang mampu mempengaruhi berbagai peristiwa politik Eropa.

China baru secara signifikan aktif melakukan diplomasi ekonomi sejak tahun 1978. Sebelumnya, aktivitas diplomasi China pada masa Mao Zedong sangat fokus pada aspek-aspek politik hingga pasca sepeninggal Mao Zedong, China mengalami krisis yang cukup menyusahakan perekonomian. Setelah masa pemerintahan diganti oleh Deng Xiaoping, tepatnya sejak tahun 1978 Cina melakukan reformasi ekonomi dengan membuka perekonomiannya terhadap asing. Reformasi ekonomi tersebut dapat dijelaskan dalam tiga preposisi, yaitu berupa

mulai dibukanya ekonomi Cina terhadap investasi asing dan *private ownership* memperbolehkan kekuatan pasar mempengaruhi harga dan alokasi barang, serta mengharuskan *material incentives* menjadi mekanisme utama dalam menstimulus peningkatan produktivitas dan efisiensi. Reformasi ini sendiri dilakukan dengan slogan *reforming and opening*, yaitu modernisasi yang dilakukan dengan menggunakan ilmu dan teknologi Barat yang dilakukan dengan aturan sosialis.

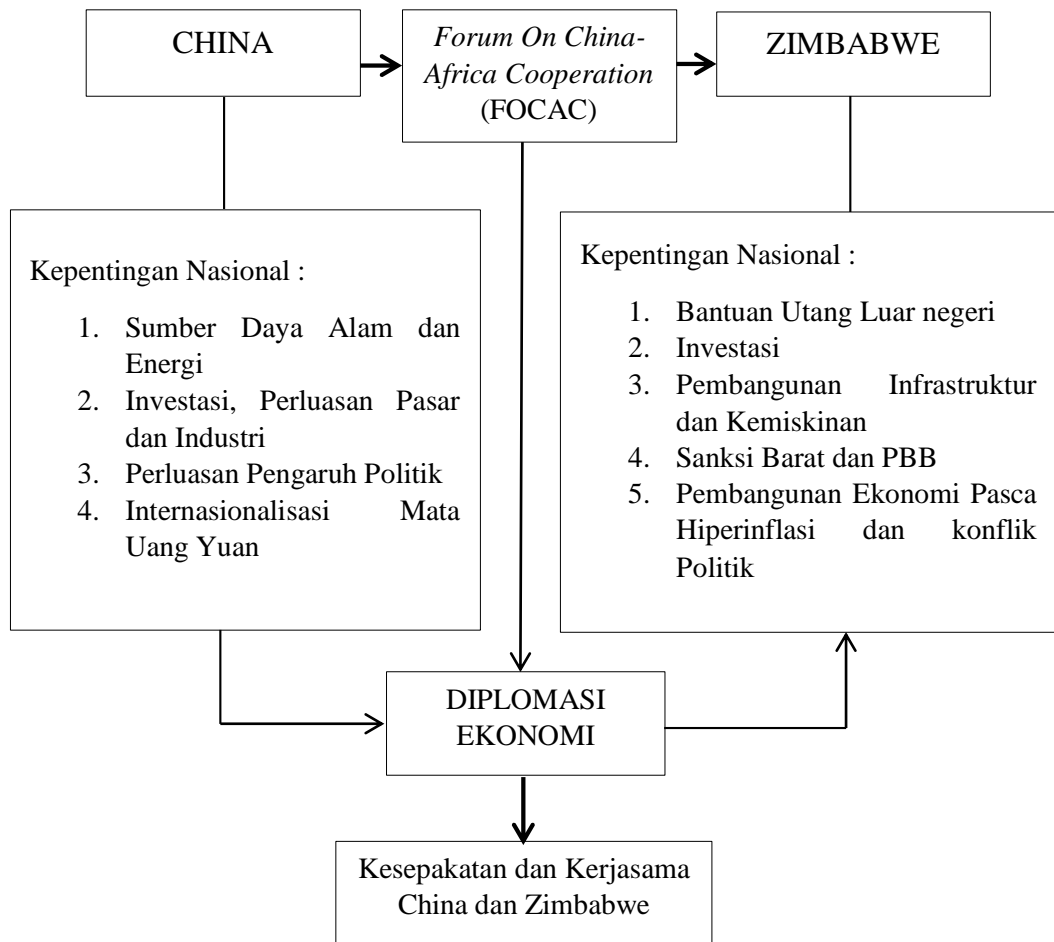
Sejak saat itu, diplomasi ekonomi China dilakukan melalui bantuan dan perdagangan luar negeri, bantuan terhadap ekspansi perusahaan domestik, penyebaran investasi asing ke luar negeri, serta berpartisipasi dalam kerjasama finansial. Diplomasi ekonomi China kini telah *interest-oriented*. Sebelumnya, diplomasi ekonomi dilaksanakan berdasarkan faktor ideologi. China hanya memberikan bantuan kepada negara-negara yang setuju dengan ideologi China. Namun, *interest* utama pembangunan China saat ini adalah konstruksi ekonomi nasional, yang mana hal ini ditunjang melalui diplomasi ekonomi. Perbedaan atau ketidaksetujuan faktor ideologi tidak akan mempengaruhi kerjasama bilateral perdagangan dan ekonomi. Diplomasi ekonomi mampu menjalankan peran yang fleksibel, berbeda dengan persaingan ideologi terdahulu yang cenderung menghalangi terjalannya kerjasama ekonomi. Lebih lanjut, diplomasi ekonomi juga membantu China meningkatkan pengaruh internasionalnya secara luas. Pembentukan mekanisme forum dalam pertemuan menteri pertama pada *Forum On China-Africa Cooperation* (FOCAC) tahun 2000 menjadi salah satu jendela kerjasama pertama antara China dan Afrika (http://www.ciis.org.cn/english/2014-01/20/content_6623715.htm diakses pada 2 Desember 2018).

Hal ini mendukung semakin kuatnya hubungan multilateral maupun bilateral China-Afrika, serta perluasan kerjasama antar pihak kedalam level yang semakin tinggi. Dengan berinvestasi di negara-negara Afrika dan menjalin hubungan yang setara, saling menguntungkan, dan kerjasama pragmatis, China telah secara signifikan meningkatkan pengaruhnya di kawasan tersebut. Hal ini kemudian dianggap sebagai salah satu contoh keberhasilan China dalam menguatkan posisi ekonominya, yang diharapkan dapat pula terjadi pada hubungannya dengan negara-negara Eropa. Kini sebenarnya negara-negara maju Eropa sudah mulai mengubah sikapnya terhadap China, khususnya sejak krisis Eropa. Selain itu, Jepang, Vietnam, Filipina dan beberapa negara lain yang terlibat sengketa teritorial dengan China juga mulai menjaga sikapnya karena menyadari pentingnya hubungan ekonomi negara-negara tersebut dengan China yang semakin besar. Diplomasi ekonomi berkontribusi dalam perdamaian, pembangunan, kerjasama, dan situasi *win-win*. Hal ini krusial bagi pertumbuhan dan pembangunan China yang membutuhkan lingkungan internasional damai dalam penerapannya. Terkait dengan partisipasi *interactivity*, *reciprocity*, dan *multiplicity* aktivitas ekonomi dapat memberikan pengaruh yang lebih lama (*longer-term influence*) ketimbang murni Diplomasi Politik dalam menjaga hubungan eksternal dan minimalisasi konflik. Secara singkat, diplomasi ekonomi dapat mendorong hubungan internasional yang terlepas dari perbedaan ideologi, mendorong terjalinnya hubungan antarnegara, ketergantungan, dan hubungan *win-win*. Sejak pemerintahan Hu Jintao, *peaceful development* menjadi kebijakan luar negeri China, yang pada hakekatnya menyatakan bahwa China akan melakukan dan

mengusahakan pembangunan tanpa secara agresif menantang dan mengubah kondisi yang ada, hal ini mengindikasikan bahwa China telah sangat sadar akan pentingnya pertumbuhan ekonomi dan pencapaian *interest* yang hanya dapat dicapai apabila kondisi sistem internasional damai atau minimal stabil, yang mana hanya dapat dicapai melalui diplomasi ekonomi.

Melalui Diplomasi ekonomi dan beberapa kebijakan yang menurut peneliti dalam kategori Diplomasi Politik ini lah peneliti melihat China telah merubah kebijakan dan politik luar negari nya dari sebelumnya, kerjasama dilakukan dengan dilatarbelakangi akan kesamaan ideologi. Namun saat ini, *interest* utama pembangunan China saat ini adalah konstruksi ekonomi nasional, yang mana hal ini ditunjang melalui diplomasi ekonomi, sekaligus untuk pemenuhan kepentingan menanamkan *power* dan pengaruhnya. Diplomasi ekonomi juga membantu China meningkatkan pengaruh internasionalnya secara luas.

Berikut Gambaran singkat tentang kerangka pemikiran penelitian ini :



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran